

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Ateng Syafruddin, Pengaturan Koordinasi pemerintah Indonesia, Bina Aksara, Bandung, 1993.
2. Admosudirjo Prajudi, Prof.Dr.Mr., Hukum Administrasi Negara, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1986.
3. Hadjon Philipus H., dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
4. Mamesah, D.J., Sistem Administrasi Keuangan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
5. Marsono, Himpunan Peraturan Tentang Pemerintah Daerah, Djambatan, Jakarta, 1999.
6. Poerwadarminta W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
7. Senja R.A., Em Zul Fajri, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, Jakarta, 2001.
8. Siagian, Sondang P., Filsafat Administrasi, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985.
9. Suganda Dann, Drs., Masalah Otonomi Daerah Serta Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, CV. Sinar Baru, Bandung, 1981.
10. Suganda Dann, Drs., Koordinasi Sebagai Pemersatu Gerak Dalam Proses Administrasi, Intermedia, jakarta, 1992.
11. Surachmad Winamo, Dr., Pengantar Methodologi Ilmiah (Dasar dan Teknik Research), Tarsito Bandung, 1972.
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

- Pemerintah Kota Binjai
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Jakarta.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, bp. Pustaka Candra, Jakarta, 2002.
 5. Konsideran Bagian Mengingat Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2001.
 6. Lima Undang-Undang Perpajakan Tahun 1997, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1997.